

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG  
KREATIF LAPANGAN (PKL)  
(Studi Taman Kuliner Tunggal Sangomang di Jl. Yos Sudarso Ujung)**

**Indah Liana Hutabalian**

**ABSTRACT**

The focus of this study is the implementation of the policy of structuring the creative field of study traders at Jl. Yos Sudarso Ujung. The objectives of this research are two things, first, see how the implementation of the Field Creative Merchant arrangement policy at Sangomang Single Culinary Park on Jl. Yos Sudarso Ujung. Second, find out what are the supporting and inhibiting factors in achieving the implementation of the Field Creative Merchant arrangement policy at the Sangomang Single Culinary Park on Jl. Yos Sudarso Ujung. The research method used in this research is descriptive qualitative method. This method is used to provide an overview of the Implementation of the Field Creative Merchant Arrangement Policy Study on the Sangomang Single Culinary Park at Jl. Yos Sudarso Ujung. The focus of the research is based on Van Mettern and Varn Horn theory which is influenced by six variables, namely policy size and objectives, resources, characteristics of executing agents, dispositions of disposing agents, communication between organizations and implementing activities, social, economic and political environment. The data obtained is based on information from the Head of the City Planning and Aesthetics Division at the Public Housing Service and Palangka Raya City Settlement Area, UPT Pasar Kahayan Staff and the Creative Field Merchant community. Data collection techniques in the form of observations, interviews and documentation. Besides that, the data analysis techniques are in the form of data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The research results on the implementation of street vendor arrangement policies in Jl. Yos Sudarso Ujung has not been carried out optimally, this happened because the human resources managing the street vendor arrangement were still inadequate as well as the absence of a special division that managed the street vendor arrangement so that the street vendor arrangement policy was carried out by the Public Housing and Palangka Raya Housing Area during this hasn't gone well.

**Keywords: Implementation, Arrangement of Field Creative Traders.**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia semakin pesat dan melahirkan masalah baru di bidang keamanan, sosial, hukum dan ekonomi. Akibat dari meledaknya jumlah penduduk di Indonesia yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan tingginya jumlah pengangguran dan tindakan kriminalitas. Akses pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang lamban mengakibatkan meningkatnya urbanisasi suatu situasi dimana masyarakat desa lebih memilih untuk tinggal di kota. Sebagian besar penduduk miskin perkotaan bekerja pada sektor informal. Sektor informal menjadi jalan

akhir yang dituju masyarakat kota dan desa yang latar belakangnya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah yang tidak terserap di sektor formal Pedagang Kaki Lima (sektor informal) ialah mereka yang mendirikan usahanya di tempat-tempat umum seperti di daerah jalan raya, di bahu jalan dan diatas drainasi sebagai sarana tempat mereka berjualan, menawarkan dagangan maupun jasa-jasanya. Kegiatan perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara Pertama, secara langsung, yaitu dengan penyerapan kapasitas tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan di suatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku (Kurniady dan Tangkilisan, 2002:21).

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah juga menggantungkan sebagian kebutuhan masyarakatnya pada sektor informal salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima. Sebagai kota besar, kota Palangka Raya juga tidak terlepas dari masalah maraknya jumlah PKL. Mereka memanfaatkan badan jalan raya sebagai tempat mendirikan usahanya. Daerah ini diminati oleh PKL karena tempat ini dilalui oleh banyak orang dan tempatnya gratis tidak dipungut biaya. Kondisi bahu jalan yang mulai dipadati oleh para PKL mulai mempersempit ruang untuk pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan lalu lintas khususnya pada saat malam hari. Secara otomatis keadaan ini juga merusak wajah kota Palangka Raya yang dijuluki sebagai Kota Cantik, Bersih dan Aman.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kebijakan publik adalah hasil komunikasi yang dibangun oleh pembuat kebijakan atas sebuah masalah yang perlu dikaji dan mencari solusinya. Kebijakan diciptakan untuk melihat masalah, gejala maupun fenomena yang bersifat publik. Publik berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak. Peran serta masyarakat sebagai figur publik dalam perumusan kebijakan menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang baik. Friedrich dalam Anderson (2016:16) menyatakan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan upaya untuk mencapai beberapa maksud dan tujuan. Topik mengenai kebijakan adalah tidak terlepas dari kaitan antara kepentingan antar kelompok baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Secara sederhana, Kebijakan dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai lembaga yang bertugas sebagai pemimpin serta kebijakan adalah usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2016:129). Ada enam variabel menurut Donald Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana

4. Sikap atau Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana.
5. Komunikasi Antar- Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Studi pada Taman Kuliner Tunggal Sangomang di Jl. Yos Sudarso Ujung. Fokus penelitian berdasarkan teori Van Mettern dan Varn Horn yang dipengaruhi oleh enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berusaha memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Disamping itu, juga dilakukan pengumpulan data mengenai penataan PKL di Jl. Yos Sudarso Ujung. Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Tujuan wawancara yaitu mengumpulkan data dari komunikasi langsung yang dilakukan melalui sejumlah pertanyaan yang ingin diajukan kepada responden secara lebih mendalam. Dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data melalui lembaga terkait berupa benda fisik seperti surat-surat, data-data, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman/ audio yang relevan dan berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn menyebutkan model implementasi kebijakan ini bersifat *top down* menurut pandangan Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino (2014), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

### **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Adapun tujuan dari Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Di Jl. Yos Sudarso Kota Palangka Raya ini dilaksanakan sesuai dengan pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan adanya UU tersebut maka diharapkan menjadi dasar Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kebijakan Penataan PKL.

### **Sumber Daya**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mampu bertanggungjawab melaksanakan kebijakan.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini menjadi pusat perhatian karena hasil kinerja implementasi kebijakan publik akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan sesuai dengan kepentingan agen pelaksananya.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Sebuah komunikasi sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan PKL ini. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dinas UPT Pasar Kahayan serta kepada masyarakat. Komunikasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya dengan pemerintah daerah adalah Rapat Umum tentang sistem penataan dan pengelolaan penarikan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan. Sedangkan komunikasi dengan Dinas UPT Pasar Kahayan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian serta pengawasan terhadap program serta komunikasi dengan masyarakat yaitu melalui sosialisasi tentang rencana penataan Kota, pemindahan dan penempatan di lokasi yang baru.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan ekonomi yang ada di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk karena semakin bertambah jumlah penduduk di kota ini maka juga akan bertambah terhadap pendapatan Daerah melalui pajak penghasilan dan antusiasme masyarakat untuk berusaha menjadi salah satu alasan oleh Pemerintah untuk melakukan penataan dengan baik. Lingkungan sosial yang ada di Kota Palangka Raya akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah dari waktu ke waktu yang berimbas kepada pertambahan jumlah angkatan kerja yang nantinya akan memberi sumbangsih terhadap pemasukan daerah. Lingkungan politik tidak ada kaitannya dalam melaksanakan kebijakana penataan PKL dan selama ini kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi yang sudah ditentukan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya tentang “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Studi pada Taman Kuliner Tunggal Sangomang di JL. Yos Sudarso Ujung” dalam penerapannya masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan penataan PKL yang selama ini direalisasikan. Ada dua faktor penghambat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan masih belum direalisasikan dengan baik, pelaksana memahami tujuan dari kebijakan penataan PKL namun tidak memiliki ukuran dalam melaksanakan penataan PKL.
2. Sumber daya finansial dan sumber daya manusia karena Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum bukan divisi khusus yang menangani pelaksana kebijakan penataan PKL sehingga kebijakan ini tidak berjalan maksimal.
3. Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL ini ditandai dukungan faktor internal dan eksternalnya. Melalui dukungan internalnya yaitu dengan adanya kerja sama yang baik antar Wasdal dan sumber daya baik dari Pimpinan hingga Staf dan dukungan pihak eksternalnya meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan penataan PKL.

## **SARAN**

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya agar membentuk divisi khusus yang menangani penataan PKL sehingga kebijakan penataan PKL dapat terkoordinasi dengan baik.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya segera menyelesaikan proses pembangunan fasilitas peti kemas, penerangan lampu jalan dan akses jalan masuk yang saat ini belum tertata dengan baik.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya agar membuat standar yang jelas terhadap pelaksanaan penataan PKL.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya dapat melibatkan organisasi formal dan informal agar kebijakan penataan PKL lebih tepat sasaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin.2013. *Komunikasi Pemerintah*. Jakarta: PT Bumi Aksara  
Agustino, 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta  
Anshori, 1996. *Sektor informal*. Jakarta: Penebar Swadaya  
Bogdan dan Taylor. 1975. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.  
Hart, Effendi. 2016. *Ekonomi Kelas Menengah* . Bandung: Alfabeta  
Juliana, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Publik*. Yogyakarta: Penibaruan

- Kurniadi dan Tangkilisan, 2002. *Perkembangan sektor informal di Indonesia*. CV Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexi J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasalong, Harbani. 2013. *Metode penelitian administrasi publik*. Bandung: Alfabeta
- Portes, Anshori. *Perkembangan Sektor Informal*. Jakarta: Sinar Abadi
- Rahayu, 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rhama, B. (2020). The meta-analysis of Ecotourism in National Parks. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1-17.
- Rhama, B. (2019). *Taman Nasional dan Ekowisata*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Rhama, B. and Reindrawati, D. Y. (2019). Geotour Guide Competency in the Context of Safety Management. *Opción*, 35(24), 885-899. .
- Rhama, B. (2019). Psychological Costs on Tourism Destination. *Journal of Advanced Management Science*, 7(3), 100-106. doi: 10.18178/joams.7.3.100-106
- Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
- Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH
- Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah. *JISPAR*, 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
- Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata di Kalimantan Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. *JISPAR*, 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U
- Rian Nugroho, 2009. *Publik policy: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo
- Santoso, Amir. 1993. *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Media Komputindo
- Solichin, 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Surachman, Winarno. 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Metode dan Teknik)*. Bandung: Penerbit Tarsito
- William Dunn. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.